

DAFTAR PUSTAKA

- Gumanti, T. A. (2018, November 05). Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Hartiyah, S. (2014). Teori Akuntansi Konsep Akuntansi Pendapatan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat II*, 84-88.
- Haryadi, E., Wau, R., & Iman, S. (2015). Important of Measurement, Scale, Type of Measurement, Reliability and Accuracy, Measurement In Accounting. Universitas Mercu Buana.
- Kementerian Dalam Negeri. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2016). Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mariani, D., & Suryani. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Sosial Dan Kinerja Lingkungan Sebagai Variabel Moderator. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No.1*, 59-78.
- P., I. M., & Cahyaningrum, I. (2019). Diambil kembali dari books.google.co.id/books?id=e--iDwAAQBAJ&pg=PA26&dq=Studi+kepustakaan+adalah&hl=id&sa=X#v=onepage&q=Studi%20kepustakaan%20adalah&f=false
- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2012). Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2012). Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2012). Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.

- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2014). Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palopo. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2014). Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palopo. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2016). Peraturan Walikota Palopo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Kota Palopo. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2017). Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- Pemerintah Daerah Kota Palopo. (2017). Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Kota Palopo: Pemerintah Daerah Kota Palopo.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Permana, G. R. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Yang Tercatat Di BEI Periode 2013-2017. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Redaksi Palopopos. (2020, Januari 14). Diambil kembali dari palopopos.co.id/2020/01/meningkat-rp9-miliar-bapenda-teratas-penyumbang-pad-2019/

Rut, P. M. (2016). Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Pengungkapan Pendapatan Dan Beban Berdasarkan PSAK No. 36 Pada AJB Bumiputera 1912 Manado. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Vol. 4 No. 1*, 604-612.